

TESIS

**DAMPAK KAWASAN INDUSTRI TERHADAP SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BAHODOPI
KABUPATEN MOROWALI**

Oleh : Abd. Anab

NIM : P022211014



**PROGRAM MAGISTER
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMINATAN KEPENDUDUKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**DAMPAK KAWASAN INDUSTRI TERHADAP SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BAHODOPI
KABUPATEN MOROWALI**

*The impact of industrialization on the socio-economic community of fishers in
Bahodopi, Morowali Regency*

**Sebagai persyaratan untuk meraih gelar magister
Disusun dan diajukan oleh**

**ABD. ANAB
P022211014**

Kepada

**PROGRAM MAGISTER
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
PEMINATAN KEPENDUDUKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS
DAMPAK KAWASAN INDUSTRI TERHADAP SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BAHODOPI
KABUPATEN MOROWALI

Disusun dan diajukan oleh

ABD. ANAB

P022211014

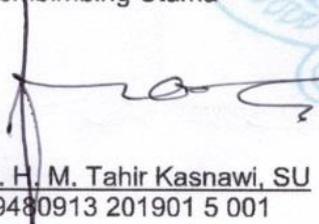
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

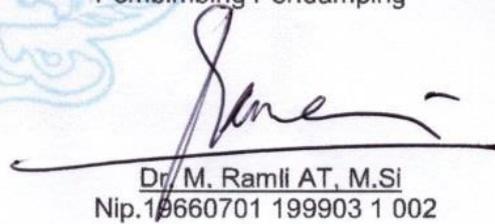
Pada tanggal 04 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

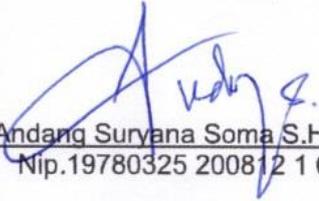
Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU
Nik. 19480913 201901 5 001

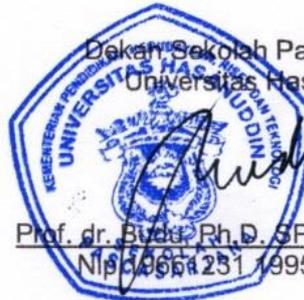

Dr. M. Ramli AT, M.Si
Nip.19660701 199903 1 002

Ketua Program Studi.
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Andang Suryana Soma S.Hut.,M.P.,Ph.D
Nip.19780325 200812 1 002


Prof. dr. Budi Rh.D. SP.M(K). M.Med Ed
Nip.19661231 199503 1 00 9



PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis yang berjudul “Dampak Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU sebagai pembimbing utama dan Dr. M. Ramli AT, M.Si sebagai pembimbing pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak yang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini telah dipublikasikan MEA : Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 7 issue 2 juni 2023, halaman 1282-1290 dan DOI : <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3230> sebagai artikel dengan judul : “Dampak Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali”.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanudin.

Makassar, 04 Januari 2024



Abd. Anab

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Dampak Kawasan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pemintan Kependudukan, Universitas Hasanudin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Bahodopi, setelah terbangunnya kawasan industri pengelolaan nikel di daerah tersebut.

Penulis menghadapi banyak tantangan dan kesulitan saat menulis tesis ini, namun penulis berhasil menyelesaikannya berkat banyaknya bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan memberikan bantuan beasiswa.
2. Rektor Universitas Hasanudin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, dan Dekan Pascasarjana Prof. Dr. Budu, Ph.D.,Sp.M(K), M.Med.Ed, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, selaku Ibunda kami serta koordinator Kependudukan yang telah berkenan mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, perhatian serta doa kepada kami mahasiswa APBN-BPS angkatan dua dari awal masuk hingga selesai kami kuliah, serta sebagai dosen penguji.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U sebagai ketua komisi penasehat dan Dr. M. Ramli AT, M.Si sebagai anggota komisi penasehat, yang dengan tulus telah menyisihkan waktunya untuk memberikan koreksi, bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
5. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng, Prof. Hasbi Marissan, M.Si, Ph.D selaku dosen penguji atas segala koreksi, saran dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.

6. Bapak Imron Taufik J. Musa, S.Si, M.Si dan Bapak Abdi Amin, SE, MM serta rekan-rekan BPS Kabupaten Banggai Kepulauan atas motivasi, dukungan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi Magister.
7. Setiap dosen dan staf pada prodi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (PPW) peminatan kependudukan atas seluruh pengetahuan serta bantuan yang selalu diberikan selama kami menempuh perkuliahan di Universitas Hasanudin.
8. Teman-teman sesama mahasiswa TB Unhas-BPS, baik itu angkatan 1 maupun angkatan 2 yang telah banyak memberikan semangat dan berbagi pengalaman pada masa perkuliahan maupun dalam menyusun tesis.
9. Pada pihak-pihak yang turut membantu, baik dalam proses pengumpulan data, pengolahan, serta interpretasi data sehingga tesis ini dapat diselesaikan, meskipun penulis tidak dapat menyebutnya satu persatu.
10. Saudara-saudaraku tercinta, Abd Gafar, Sarini, Ariyati, Julianto, Asrida, S.Pi, Aswanto, ST, MT, Asdiki serta orang tua kami selama ada di Makassar Bapak Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag bersama istri dan seluruh keluarga atas doa, dorongan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
11. Akhirnya, rasa terima kasih penulis tujukan kepada ibunda Ertini S. Puyu, istriku tercinta Asliati, S. Farm serta anakku tercinta Arsyilah Huwaida Putri, yang penuh pengertian, pengorbanan, keikhlasan, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam perjalanan menyelesaikan pendidikan.

Akhirnya, dengan segala rendah hati, penulis mengharapkan kritik, masukan, serta koreksi dari seluruh pihak untuk membuat tesis ini menjadi lebih baik.

Makassar, 04 Januari 2024

Abd. Anab

ABSTRAK

Abd Anab. Dampak Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
(Dibimbing oleh **M.Tahir Kasnawi** dan **M.Ramli AT**)

Pembangunan dan Pengembangan kawasan industri pada suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang selama ini dikenal dengan sosial ekonomi yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kawasan industri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan serta aktifitas nelayan setelah adanya kawasan industri. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Teknik pengambilan anggota sampel menggunakan teknik *probability sampling*. Jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat *error* sebesar 10 persen yaitu sebanyak 58 responden dari 141 populasi yang ada. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kawasan industri berdampak terhadap sosial masyarakat nelayan meliputi kesehatan yang berdampak kurang baik, di mana terjadi peningkatan pada kondisi sering terkena penyakit dan penyakit yang biasa diderita oleh nelayan yaitu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Berdampak baik pada pendidikan nelayan, di mana terlihat besarnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya pendidikan, terutama pada dunia kerja. Berdampak baik pada perumahan, di mana dengan adanya kawasan industri terjadi perubahan fisik bangunan rumah nelayan, sehingga sebagian besar nelayan telah memiliki rumah layak huni. Secara umum, adanya kawasan industri berdampak baik terhadap kondisi ekonomi nelayan, di mana terjadi peningkatan pendapatan pada sebagian besar nelayan, namun pendapatan terbesar bukan berasal dari sektor perikanan. Banyaknya peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk menambah penghasilan, serta ada peningkatan pada kepemilikan aset. Namun berdampak kurang baik terhadap aktivitas nelayan, di mana terjadi pengurangan hasil tangkapan dan waktu dalam melaut. Serta dalam mencari ikan, nelayan harus menempuh jarak yang begitu jauh, karena telah terjadi pencemaran pada kawasan pesisir pantai.

Kata kunci : kawasan industri, sosial, ekonomi, aktivitas, masyarakat nelayan

ABSTRACT

Abd Anab. The Impact of Industrialization on the Socio-Economy Community of fisher in Bahodopi District, Morowali Regency. (Supervised by **M.Tahir Kasnawi** and **M.Ramli AT**)

The construction and development of industrial estates in an area is expected to improve the standard of living of the community and also have a direct impact on the socio-economic life of the surrounding community, especially fishermen who have been known for their low socio-economic status. This study aims to determine the impact of industrial estates on the socio-economic conditions of fishing communities and the activities of fishermen after the existence of industrial estates. The analysis method used is descriptive analysis. The technique of taking sample members uses probability sampling technique. The number of samples using the Slovin formula with an error rate of 10 percent is 58 respondents from 141 existing populations. Data collection through interviews, observations and questionnaires. The results showed that the existence of industrial estates has an impact on the social of fishing communities including unfavorable health impacts, where there is an increase in the condition of frequent illnesses and diseases commonly suffered by fishermen, namely Acute Respiratory Infections (ARI). Good impact on fishermen's education, where there is a high awareness of the importance of education, especially in the world of work. Good impact on housing, where with the existence of industrial estates there is a physical change in the building of fishermen's houses, so that most fishermen already have livable houses. In general, the existence of industrial estates has a good impact on the economic conditions of fishermen, where there is an increase in income for most fishermen, but the largest income does not come from the fisheries sector. There are many job opportunities that can be utilized by fishermen to increase income, and there is an increase in asset ownership. However, it has an unfavorable impact on fishermen's activities, where there is a reduction in catches and time at sea. And in looking for fish, fishermen have to travel such a long distance, because there has been pollution in the coastal area.

Keywords: industrial area, social, economic, activities, fishermen community

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan Konseptual dan Teoritis.....	10
2.1.1. Konsep Kawasan Industri.....	10
2.1.2. Industri.....	12
2.1.3. Dampak Industri	13
2.1.4. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan	15
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Konseptual	25
2.4. Defenisi Konsep	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Rancangan Penelitian.....	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Metode Pengumpulan Data	32
3.5. Populasi dan Sampel.....	33
3.6. Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37

4.1.1.	Kondisi Geografis Kecamatan Bahodopi.....	37
4.1.2.	Kependudukan	38
4.1.3.	Kareteristik Responden	41
4.2.	Kondisi Sosial Masyarakat Nelayan.....	43
4.2.1.	Kesehatan	43
4.2.2.	Pendidikan	50
4.2.3.	Perumahan.....	56
4.3.	Kondisi Ekonomi Masyarakat Nelayan	61
4.3.1.	Pendapatan	62
4.3.2.	Lapangan Pekerjaan.....	67
4.3.3.	Kepemilikan Aset.....	70
4.4.	Aktivitas Masyarakat Nelayan	73
BAB V PENUTUP		80
5.1.	Kesimpulan.....	80
5.2.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN.....		87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Morowali Menurut Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2014-2021	3
Tabel 1.2	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2021 (Juta Rupiah)	5
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Bahodopi Tahun 2020	38
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bahodopi Pada Tahun 2014 dan Tahun 2020	39
Tabel 4.3	Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden	41
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Responden	42
Tabel 4.5	Klasifikasi Usia Responden	42
Tabel 4.6	Jumlah Anggota Rumah Tangga Nelayan Menurut Umur	43
Tabel 4.7	Kondisi Kesehatan Nelayan Sebelum dan Setelah Adanya Kawasan Industri	44
Tabel 4.8	Jenis Penyakit Yang Biasa Diderita oleh Rumah Tangga Nelayan	45
Tabel 4.9	Jumlah Penderita Penyakit ISPA Menurut Desa di Kecamatan Bahodopi Tahun 2018 -2022	46
Tabel 4.10	Tabel Kunjungan Masyarakat Nelayan Pada Fasilitas Kesehatan	48
Tabel 4.11	Jumlah Fasilitas Kesehatan, Klinik dan Apotek di Kecamatan Bahodopi tahun 2022	48
Tabel 4.12	Persepsi para Nelayan Terhadap Kondisi Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bahodopi	49
Tabel 4.13	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Seluruh Anggota Rumah Tangga Responden	51
Tabel 4.14	Jumlah Anggota Rumah Tangga Nelayan Yang Sementara Sekolah dan Belum Sekolah	51
Tabel 4.15	Tingkat Pendidika Usia Kerja pada Rumah Tangga Nelayan ...	52
Tabel 4.16	Persepsi Nelayan Terhadap Kondisi Pendidikan Setelah Adanya Kawasan Industri	53
Tabel 4.17	Status Kepemilikan Rumah Nelayan	56
Tabel 4.18	Jenis Atap Terluas pada Rumah Nelayan	56

Tabel 4.19	Jenis Dinding Terluas Pada Rumah Nelayan	57
Tabel 4.20	Jenis Lantai Terluas Pada Rumah Nelayan.....	57
Tabel 4.21	Luas Lantai Pada Rumah Nelayan	58
Tabel 4.22	Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar (WC).....	58
Tabel 4.23	Sumber Air Minum Utama Nelayan	59
Tabel 4.24	Jumlah Rumah Nelayan yang Layak Huni dan Tidak Layak Huni	60
Tabel 4.25	Kondisi Perumahan Setelah Adanya Kawasan Industri	60
Tabel 4.26	Sektor Pendapatan Terbesar Rumah Tangga Nelayan	63
Tabel 4.27	Jumlah ART Nelayan Yang Bekerja	63
Tabel 4.28	Pendapatan Nelayan Sebelum dan Setelah Adanya	64
Tabel 4.29	Persepsi Nelayan Terhadap Kecukupan Pendapatan Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari-hari.....	65
Tabel 4.30	Persepsi Nelayan Terhadap Pendapatan Setelah Adanya Kawasan Industri	65
Tabel 4.31	Persepsi Nelayan Terhadap Pekerjaannya Sekarang	67
Tabel 4.32	Persepsi Nelayan Terhadap Banyaknya Lapangan Pekerjaan .	68
Tabel 4.33	Persepsi Nelayan Terhadap Kemampuan Bekerja di luar Sektor Perikanan.....	68
Tabel 4.34	Persepsi Nelayan Terhadap Minat Bekerja Pada Kawasan Industri	69
Tabel 4.35	Kepemilikan Aset Pada Rumah Tangga Nelayan	71
Tabel 4.36	Jumlah Nelayan yang Memiliki Kapal/Perahu Motor, Sepeda Motor dan Mobil	71
Tabel 4.37	Persepsi Nelayan Atas Peningkatan Kepemilikan Aset	72
Tabel 4.38	Penggunaan Alat Transportasi Untuk Menangkap Ikan.....	74
Tabel 4.39	Lokasi Penangkapan Ikan Sebelum dan Setelah Adanya Kawasan Industri	74
Tabel 4.40	Jumlah Trip Menangkap Ikan Sebelum dan Setelah Adanya Kawasan Industri (Seminggu)	75
Tabel 4.41	Jumlah Hasil Tangkapan Sebelum dan Setelah Adanya Kawasan Industri	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2014-2021.....	3
Gambar 1.2	PAD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 (ribu rupiah)	6
Gambar 1.3	Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2014-2022.....	6
Gambar 1.4	Jumlah Kasus ISPA di Kecamatan Bahodopi Pada Tahun 2018-2022.....	7
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian	27
Gambar 3.1	Peta Lokasi Penelitian.....	31
Gambar 4.1	Peta Kecamatan di Kabupaten Morowali.....	37
Gambar 4.2	Jumlah Penderita Penyakit DBD, Malaria dan Diare di Kecamatan Bahodopi Tahun 2022.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki banyak kekayaan yang berasal dari sumber daya alam yang tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan tersebut seperti hutan hijau yang luas yang dapat dijadikan sebagai sumber paru-paru dunia, serta berbagai aneka bahan tambang terpendam di dalam bumi Indonesia. Dapat dikatakan bahwa industri pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan dari suatu negara, di mana industri pertambangan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia yang ada di dunia. Dengan adanya industri pertambangan dapat menyiapkan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat, dan berkurangnya pengangguran (Syahrir, 2017). Industri adalah salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam perkembangan dan pembangunan suata daerah, yang kemudian menjadi pilihan pemerintah untuk pengembangan daerah, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Secara umum kegiatan industri dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi suata daerah terus berjalan (Rahayuningsih, 2017).

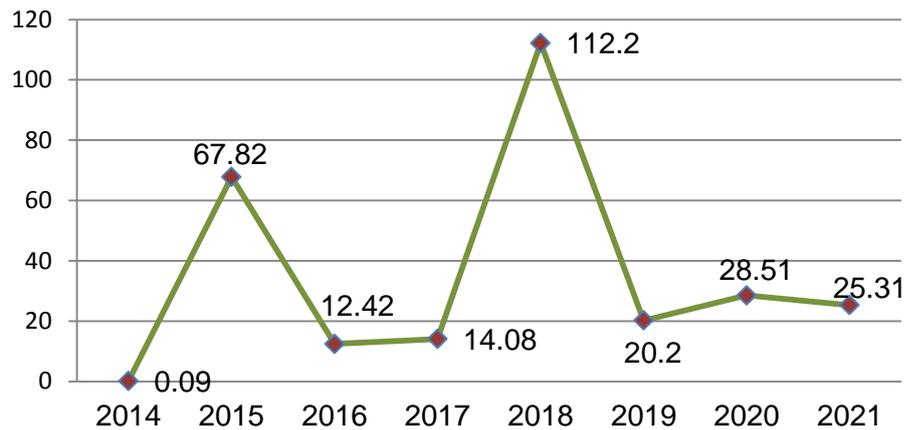
Pembangunan nasional dengan basis wilayah bukan hanya memerlukan ekspansi ekonomi, tetapi harus ada juga pemerataan hasil pembangunan ekonomi serta sosial pada seluruh negeri. Dalam proses percepatan dan perluasan pembangunan perekonomian daerah, pembangunan daerah selalu bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Apabila suatu daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah serta efisien dan efektif dalam pemanfaatannya, maka ada pula harapan yang besar pada daerah tersebut untuk mencapai pada suatu kondisi perekonomian yang lebih baik dalam jangka panjang (Soerjani et al., 1987). Pengembangan sentra pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pemanfaatan potensi dan keunggulan yang dimiliki pada suatu daerah, salah satunya dengan pengembangan kawasan industri. Pembangunan kawasan industri menjadi salah satu program utama pemerintah dalam pengembangan kawasan strategis (Pamungkas, 2018).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana setiap daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pada pertambangan. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan undang-undang yang mengatur tentang kewenangan baik pada tingkat pusat maupun kabupaten/kota dalam mengelola pertambangan. Diharapkan bahwa posisi pemerintah daerah (kabupaten atau kota) akan semakin diperkuat dengan hadirnya kedua aturan tersebut. Akan tetapi pemerintah baik kabupaten atau kota belum dapat memanfaatkan undang-undang ini sebagai kekuatan hukum untuk melakukan upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan dan efektif (Wulan, 2012).

Kita ketahui bahwa sektor industri memegang peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian daerah maupun nasional. Di mana sektor industri dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan negara, sektor tersebut juga menawarkan banyak peluang usaha yang berkontribusi aktif terhadap upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat (Ayu F.S et al., 2016). Adanya pembangunan dan pengembangan kawasan industri pada suatu daerah yang membuat banyaknya perusahaan yang masuk, diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Indikatornya dapat dilihat dari adanya peningkatan pada pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang terserap pada kawasan industri, dan banyaknya peluang usaha yang terbuka untuk masyarakat lokal, sehingga hal tersebut akan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Nuraeni, 2018).

Kabupaten Morowali merupakan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan perkembangan kawasan industri yang cukup pesat dan masuk dalam kawasan strategis nasional. Hal tersebut membuat Kabupaten Morowali dinobatkan sebagai daerah kabupaten pada pulau sulawesi dengan perekonomian tertinggi. Pada tahun 2020 semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi mines akibat pandemi covid-19, namun Kabupaten Morowali menjadi daerah dengan nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan persentase mencapai 28,51 persen (BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2022). Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali terus mengalami *trend* positif. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Morowali

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2014-2021

Semenjak adanya kawasan industri di Kecamatan Bahodopi, struktur perekonomian Kabupaten Morowali dalam beberapa tahun terakhir telah didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sementara pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan serta lapangan usaha yang lain terus mengalami penurunan. Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2021 terdapat 5 lapangan usaha yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Morowali, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Morowali Menurut Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2014-2021

Lapangan Usaha	Tahun							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	19,96	13,54	12,68	11,57	5,48	4,55	3,27	2,17
Pertambangan dan Penggalian (%)	20,98	26,19	26,88	27,30	18,55	18,22	18,32	18,63
Industri Pengolahan (%)	12,15	29,68	33,09	35,52	62,81	64,86	69,94	71,23
Konstruksi (%)	31,63	19,64	16,54	15,42	7,97	7,67	5,06	5,61
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	6,21	4,86	4,87	4,59	2,39	2,12	1,53	1,08

Sumber : BPS Kabupaten Morowali

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Morowali salah satunya karena adanya kawasan industri nikel. Menurut Lampe (2021) kawasan industri Morowali merupakan salah satu kawasan pengelolaan nikel terbesar di Indonesia dan bahkan di kawasan ASEAN saat ini. Sebuah kawasan industri yang bergerak pada pengolahan bijih nikel dari hulu hingga hilir, dari penambangan bijih nikel hingga pada pembuatan baterai lithium yang akan digunakan pada kendaraan mobil listrik. Kawasan yang memiliki luas sekitar 2.000 ha telah berbagai jenis kegiatan usaha, baik usaha utama pertambangan dan pengolahan nikel ke dalam beragam produk turunannya maupun kegiatan pendukung lainnya seperti pelabuhan, pembangkit listrik, bandara khusus, wisma, mes untuk karyawan, klinik, kampus Politeknik serta berbagai usaha lainnya (Lampe, 2021).

Kawasan industri yang didirikan pada tahun 2014 dengan investor utama Shanghai Decent Investment. Ltd, PT. Sulawesi Mining Investment dan PT. Bintang Delapan Mineral, yang kemudian dikenal dengan nama PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP). Perusahaan yang kini terkenal sebagai pengelola kawasan industri dengan 25 perusahaan didalamnya telah berkembang pesat dalam waktu kurang dari 7 tahun. Dengan jumlah tenaga kerja yang terserap hingga pada bulan maret tahun 2020 adalah sebanyak 37.701 tenaga kerja Indonesia dan 5.900 tenaga kerja asing yang mayoritas berasal dari China. (PT. Indonesia Morowali Industrial Park dalam Lampe, 2021)

Kawasan Industri Morowali masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Perekonomian No 9 tahun 2022. Sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan terus melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan tersebut. Pada tahun 2020 kementerian PUPR melaksanakan pembangunan revitalisasi *drainase* pada ruan jalan Bungku-Bahodopi-batas Sulawesi Tenggara, tahun 2021-2022 melakukan pembangunan jalan Bahodopi-batas Sulawesi Tenggara, dan tahun 2020 sampai 2023 melakukan preservasi jalan Bahodopi-batas Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut, mengeluarkan anggaran sebesar Rp 135,8 Miliar. Hal tersebut tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Morowali, khususnya pada Kecamatan Bahodopi.

Industri pertambangan nikel di Kabupaten Morowali dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Dampak penting dengan hadirnya Kawasan Industri Morowali yang

secara positif dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama adalah peningkatan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha. Hasil studi P4K-Untad tahun 2019, menunjukkan bahwa 76 % dari masyarakat Bahodopi memiliki pendapatan di atas 3 juta rupiah per bulan. Bahkan ada 43 % dari populasi tersebut mengklaim memiliki pendapatan di atas 5 juta rupiah per bulan (Marzuki et al., 2018). Berdasarkan data BPS, pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Morowali yang dapat dilihat berdasarkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku setiap tahun terus menerus mengalami peningkatan. Secara lebih rinci dapat kita dilihat berdasarkan tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2021 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Morowali	68.0	113.3	126.2	145.2	313.2	375.1	388.1	588.3
Morowali Utara	57.5	66.3	69.1	72.9	80.9	86.7	92.6	107.1
Banggai	32.2	42.5	58.0	65.2	72.3	78.6	75.7	84.2
Palu	41.8	46.6	49.6	53.8	58.9	64.2	64.8	69.3
Sulawesi Tengah	31.9	37.4	41.1	45.4	55.5	60.8	63.8	81.7

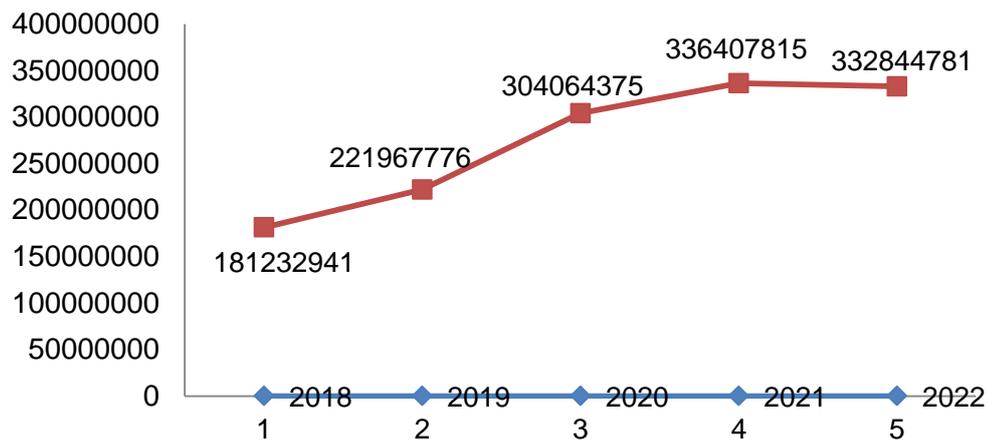
Sumber : BPS Sulawesi Tengah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada tabel 1.2 terlihat secara jelas bahwa Kabupaten Morowali apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya, misalnya Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai dan Kota Palu, maka Kabupaten Morowali merupakan kabupaten dengan PDRB perkapita paling tinggi di Sulawesi Tengah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, serta pada tahun 2021 merupakan kabupaten dengan PDRB perkapita tertinggi di Pulau Sulawesi. Nilai PDRB perkapita didapatkan dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat pada suatu daerah, sangat mempengaruhi PDRP perkapita.

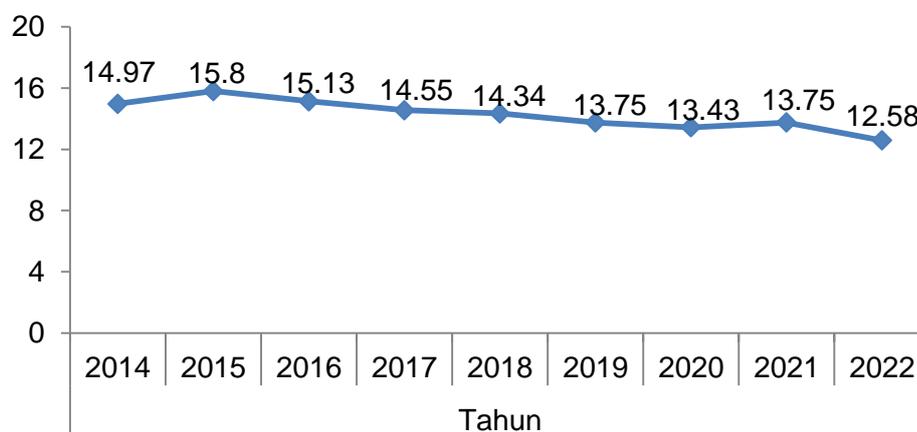
Keberadaan kawasan industri tersebut pula dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali, dimana hampir setiap tahun terus terjadi peningkatan. Selanjutnya hal tersebut terlihat pada gambar 1.2 berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Morowali

Gambar 1.2 PAD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022 (ribu rupiah)

Pada gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali mengalami peningkatan, dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan sejumlah Rp. 152 milyar atau sekitar 83,6 persen. Dengan peningkatan tersebut, dapat mendukung setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Morowali dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, seperti program dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan pada masyarakat. Adanya kawasan industri juga membuat tingkat kemiskinan di Kabupaten Morowali hampir setiap tahun mengalami penurunan.



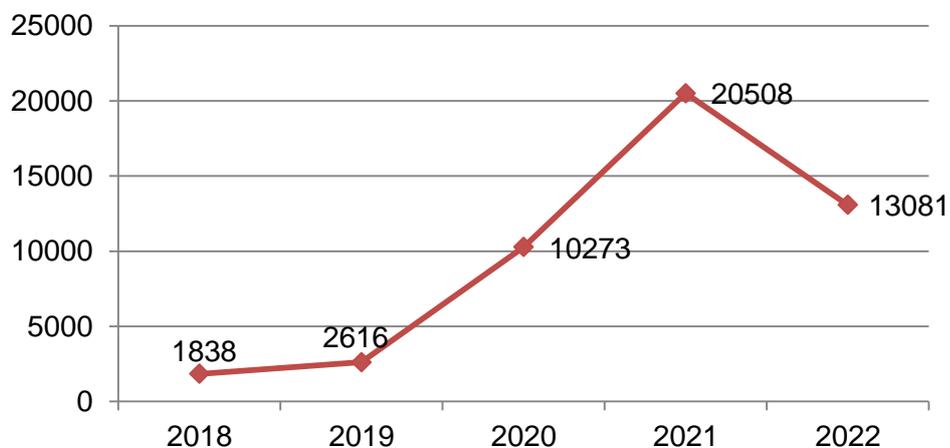
Sumber : BPS Kabupaten Morowali

Gambar 1.3 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2014-2022

Pada gambar 1.3 terlihat bahwa terjadi penurunan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Morowali. Di mana pada tahun 2014 sebesar 14,97

persen kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 12,58 persen, terjadi penurunan 2,39 persen dalam kurun waktu 8 tahun. Terbukanya banyak lapangan usaha dari berbagai sektor, sehingga membuat banyak menyerap tenaga kerja masyarakat lokal, merupakan salah satu faktor penurunan angka kemiskinan.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi, berbagai dampak sosial, budaya dan lingkungan juga menyertai perkembangan kawasan industri ini. Terjadi perubahan mata pencaharian masyarakat lokal terutama petani, peladang dan nelayan menjadi pekerja industri atau membuka usaha perdagangan dan lain-lain. Perubahan gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif. Kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat, serta banyaknya pendatang yang mencari kerja mempengaruhi tatanan sosial masyarakat lokal. Menurut Lampe (2021), dampak paling mengkhawatirkan lainnya adalah isu lingkungan, baik terkait dengan bencana banjir maupun debu batubara dan gangguan lalu lintas (Lampe, 2021). Akibat dari lingkungan yang buruk, misalnya kualitas udara yang buruk akibat dari debu batubara, polusi kendaraan bermotor, dan debu yang dihasilkan dari aktivitas alat-alat berat perusahaan membuat penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau dikenal dengan penyakit ISPA banyak menyebar di masyarakat setempat. Selama 5 tahun terakhir penderita penyakit ISPA di Kecamatan Bahodopi terus meningkat, di mana pada tahun 2018 jumlah penderita penyakit ISPA sebesar 1.838 kasus, meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 13.081 kasus.



Sumber : Puskesmas Bahodopi

Gambar 1.4 Jumlah Kasus ISPA di Kecamatan Bahodopi Pada Tahun 2018-2022

Isu penting lainnya menyangkut eksistensi nelayan lokal dalam dinamika sosial mengiringi perkembangan PT. IMIP. Sejak IMIP beroperasi, nelayan setempat, tidak lagi produktif sebagai seorang nelayan yang selalu beraktivitas di laut. Kegiatan pelabuhan dengan lalu lalang kapal dan semakin ramainya bongkar muat, reklamasi pantai dan pembuangan air limbah pabrik saat ini semakin lama menyebabkan terganggunya aktivitas nelayan. Sebagian nelayan memilih untuk pergi melaut ditempat yang lebih jauh, jika mendapatkan modal yang cukup untuk membeli BBM, maka nelayan akan pergi melaut ke wilayah Kecamatan Menui Kepulauan hingga ke perbatasan Sulawesi Tenggara. Namun bagi nelayan yang mengalami kesulitan modal, mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah dan melakukan kegiatan pembuatan perahu, yang nantinya akan dijual untuk keperluan hidup sehari-hari (Lampe, 2021).

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka ada beberapa masalah utama dari penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kawasan industri terhadap kesehatan, pendidikan dan pemukiman masyarakat nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali?
2. Bagaimana dampak dari kawasan industri terhadap pendapatan, lapangan pekerjaan dan kepemilikan aset masyarakat nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali?
3. Bagaimana dampak pengembangan kawasan industri terhadap aktivitas nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kawasan industri terhadap kesehatan, pendidikan dan pemukiman pada masyarakat nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kawasan industri terhadap pendapatan, kepemilikan aset dan lapangan pekerjaan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengembangan kawasan industri terhadap aktivitas nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali?

1.4. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan tentang dampak kawasan industri terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Morowali tentang kekurangan-kekurangan apa yang terjadi di masyarakat nelayan akibat adanya kawasan industri, terutama pada kondisi sosial ekonomi serta aktivitas nelayan.
3. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dampak dari kawasan industri terhadap kehidupan masyarakat terutama masyarakat nelayan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah Dampak Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan yang ada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Kondisi sosial yang akan diteliti yaitu kesehatan, pendidikan dan pemukiman (rumah tinggal), dan untuk kondisi ekonomi yaitu pendapatan, kepemilikan aset dan lapangan pekerjaan, serta aktivitas nelayan setelah adanya kawasan industri. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dari masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Bahodopi dan data sekunder yang didapatkan pada beberapa sumber.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Konseptual dan Teoritis

2.1.1. Konsep Kawasan Industri

Kawasan industri, menurut Bredo (1960) didefinisikan sebagai sebidang tanah yang kemudian dibagi dan dibangun dengan mempertimbangkan penggunaan secara bersama oleh sekelompok perusahaan industri. Perencanaan ini mencakup rencana untuk membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang lainnya (Bredo, 1960). Menurut Alexander (1963), kawasan industri merupakan kelompok pabrik skala ekonomi yang dibangun pada lokasi yang sesuai dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sarana transportasi, sumber air minum, sumber daya listrik, perkantoran seperti bank dan kantor pos, pusat kebugaran, kantin dan poliklinik. Dalam pedoman teknis fasilitas pelayanan umum, perusahaan menerima semua fasilitas dan utilitas tersebut dengan pengaturan khusus (Alexander, 1963).

Organisasi Pengembangan Industri PBB atau UNIDO (1997), mengatakan bahwa kawasan industri adalah suatu kawasan lahan yang dikembangkan, direncanakan dan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai perencanaan, yang kemudian akan dilengkapi dengan sarana transportasi, prasarana jalan dan sarana umum lainnya yang dapat memberi manfaat bagi kawasan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka kawasan industri diciptakan dalam rangka untuk memberikan layanan fasilitas pendukung, sehingga dapat memotivasi bangkitnya industri manufaktur lainnya. Sarana tersebut terkait pada sarana transportasi, logistik, sumber daya listrik, pendidikan, pergudangan, riset, berbagai bidang usaha, segala administrasi, pariwisata, hunian, olahraga, serta sarana kesehatan (UNIDO, 1997).

Sedangkan kawasan industri menurut Falcke (1999) adalah sebuah area yang memiliki lahan dan berbagai sarana dan prasarana seperti sarana jalan, utilitas, telekomunikasi, pengerjaan dan pengolahan sampah, pengetesan dan kontrol kualitas standar, lokasi rekreasi, layanan keamanan, rumah sakit, serta kantor pos (Falcke, 1999). Sementara itu, menurut Kumar (2008), kawasan industri adalah lahan geografis yang terlihat jelas batasannya, kemudian dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur dengan kualitas yang sangat tinggi sebagai tempat usaha pada bidang industri. Ada otoritas tunggal yang

mengelola kawasan industri tersebut, memiliki keabsahan dalam berkolerasi dengan para tenant. Otoritas tersebut membuat berbagai peraturan atau ketentuan dalam rangka pengelolaan dan operasional kawasan industri seperti membuat aturan zonasi, aksesibilitas, dan penggunaan berbagai utilitas (Kumar, 2008).

Di Indonesia, istilah “kawasan industri” pertama kali digunakan dalam Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang kawasan industri, yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 tentang kawasan industri dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Undang-undang No. 3 tahun 2014 menetapkan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang beroperasi di dalamnya (Winardi et al., 2019).

Tujuan pembangunan suatu kawasan industri adalah untuk dapat mendorong pertumbuhan pada sektor industri yang lebih teratur, sistematis, dan memberikan hasil guna yang lebih baik untuk wilayah tersebut. UNIDO (2012) menyatakan bahwa ada perbedaan motivasi untuk membangun wilayah industri di negara-negara maju dan berkembang. Kawasan industri pada negara berkembang bertujuan untuk (a). Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja pada tingkat nasional, regional dan domestik, (b). Memikat investasi asing, (c). Mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan. Di sisi lain, di negara maju kawasan industri dirancang sebagai kluster pergudangan dan sentral pengiriman, bahkan beberapa negara mengubahnya menjadi kawasan industri ramah lingkungan, dengan tujuan untuk meminimalkan faktor-faktor yang mengganggu dari luar, seperti polusi dan kemacetan.

Menurut Kumar (2008), tujuan pembangunan kawasan industri adalah (a) mendorong pengembangan industri dan kewirausahaan; (b) memotivasi tumbuhnya industri skala kecil; (c) mewujudkan pembangunan yang terdesentralisasi di semua wilayah; (d) mendorong pertumbuhan industri pendukung industri besar, baik publik maupun swasta; (e) memikat investasi; (f) menciptakan lapangan kerja; dan (g) memanfaatkan sumber daya bahan baku, tenaga kerja terampil, dan akses ke pasar (Kumar, 2008).

2.1.2. Industri

Industri terdiri dari semua perusahaan atau usaha yang bekerja untuk mengubah bahan dasar atau barang yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai lebih tinggi. Perusahaan yang menyediakan jasa industri dan mengerjakan produk industri juga termasuk dalam industri ini (BPS, 2020). Menurut Kertasapoetra, (1987), industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi produk yang berharga. Sedangkan menurut Rustiati, industri sebagai tempat pembuatan bahan mentah menjadi bahan baku atau produk siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia (Kertasapoetra, 1987).

Menurut Kuncoro (2007), industri dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai kelompok bisnis yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi. Dalam pengertian yang sempit, industri dapat didefinisikan sebagai kelompok perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dimana ada kesamaan dalam penggunaan bahan baku, proses, produk akhir dan konsumen akhir (Kuncoro, 2007)

Pada pasal 1 UU No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian mengatakan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam istilah ekonomi, ada dua definisi dari industri yaitu definisi secara luas dan secara sempit. Di mana secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan bidang ekonomi yang produktif. Sementara definisi secara sempit, industri adalah suatu usaha mengubah barang dasar secara mekanis, kimiawi, atau manual sehingga menjadi barang setengah jadi (Sumarni, 2019).

Badan usaha yang beroperasi di bidang industri di wilayah Indonesia disebut dengan perusahaan industri (Peraturan Pemerintah tentang kawasan industri). Untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan, suatu perusahaan industri akan menghasilkan produk yang memiliki ciri khas yang unik, dan perusahaan tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak tersebut. Pendirian suatu perusahaan tidak akan terlepas dari pengawasan pemerintah (Sumarni, 2019).

Di Indonesia, industri dapat dimasukkan ke dalam beberapa kelompok. Kita dapat menggunakan beberapa perspektif untuk mengetahui berbagai macam industri dari berbagai sudut pandang. Pertama, klasifikasi industri yang

dibuat oleh Departemen Perindustrian (DP). Menurut Lincoln Arsyad (2015), industri nasional di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu :

- a. Industri Dasar terdiri dari kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan Industri Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam Industri IMLD yaitu industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat, kendaraan, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Pada industri IKD yaitu industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri silikat, dan sebagainya.
- b. Industri Kecil meliputi industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam, dan industri logam.
- c. Industri Hilir adalah kelompok Aneka Industri (AI) yang mencakup industri yang mengelolah sumber daya hutan, industri yang mengelolah hasil pertambangan, industri yang mengelolah sumber daya pertanian, dan lain sebagainya.

Kedua, untuk BPS membagi industri menjadi beberapa kategori, yang dilihat berdasarkan jumlah orang yang digunakan untuk bekerja, yaitu :

- a. Jumlah yang bekerja sebanyak 1-4 orang disebut industri rumah tangga
- b. Jumlah yang bekerja sebanyak 5-19 orang disebut industri kecil.
- c. Jumlah yang bekerja sebanyak 20-99 orang disebut industri menengah.
- d. Jumlah yang bekerja sebanyak 100 orang atau lebih disebut industri besar.

Industri Nikel adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan produk kimia metalik yang terdaftar dalam tabel periodik dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Sifat tahan karat nikel tidak ada dalam bentuk murni, namun jika digabungkan dengan besi, krom, logam dan lainnya, dapat membentuk baja tahan karat yang keras (Sumarni, 2019).

2.1.3. Dampak Industri

Akibat, efek, atau pengaruh yang terjadi (baik negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang saat melakukan kegiatan tertentu dikenal sebagai dampak (Sumarni, 2019).

Menurut Handoyo dalam Parunrunan (2012), ada dua jenis dampak yaitu dampak primer serta dampak sekunder. Dampak primer adalah menyangkut perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan

pembangunan secara langsung. Sementara dampak sekunder adalah perubahan pada lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan secara tidak langsung atau sebagai kelanjutan dari dampak primer. Oleh karena itu, dampak adalah pengaruh abstrak yang dihasilkan oleh proses pembangunan yang menyebabkan perubahan yang bersifat permanen dan berkelanjutan (Parunrungan, 2012).

Menurut Nuraeni (2018), kehadiran industri di suatu wilayah, baik dalam skala industri besar maupun skala industri kecil, akan berdampak dan mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Peningkatan pendapatan masyarakat, yang disebabkan oleh adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat lokal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, yang merupakan Indikator peningkatan kondisi ekonomi masyarakat (Nuraeni, 2018). Industri dapat mempengaruhi masyarakat melalui nilai-nilai, pengaruh fisik dan upaya kelompok industrial intersert untuk mempengaruhi masyarakat (Parker & dkk, 1992). Dibukanya lapangan pekerjaan dalam suatu industri menyebabkan peluang baru, baik untuk usaha pekerja maupun untuk usaha bebas. Peluang ini langsung memenuhi kebutuhan industri (Singgih, 1991).

Menurut Syahrir (2017), lingkungan dapat terpengaruh oleh kegiatan industri pertambangan. Ini termasuk perubahan pada bentang alam, habitat flora dan fauna, struktur tanah, pola aliran permukaan air dan air tanah dan lainnya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan jenis dan intensitas yang berbeda. Kegiatan pada industri pertambangan dapat mengubah dan meniadakan fungsi dari lingkungan (Syahrir, 2017).

Daya dukung alam adalah istilah yang mengacu pada kemampuan alam untuk memberikan dukungan kepada kehidupan manusia dan sangat terkait dengan kerusakan lingkungan (Wardana, 2017). Banyak orang yang masih kurang peduli terhadap kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Bagi mereka, prioritas utama adalah kesejahteraan material sesaat, tetapi mereka mengabaikan berbagai tragedi kerusakan lingkungan yang biasanya menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri dan bahkan bagi orang lain yang tidak menyadarinya (Kartodihardjo & Dkk, 2005). Menurut Hadi (2006), anggapan tentang lingkungan adalah milik semua, sebagian besar orang merasa tidak bersalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam sebanyak-banyaknya dan membuang limbah ke media lingkungan (Hadi, 2006).

Penambangan ekstraksi dapat mengubah sirkulasi massa air seiring dengan kedalaman penggalian atau pengerukan dan meningkatkan kekeruhan, sedimentasi, dan kerusakan dasar di wilayah pesisir yang di mana aktivitas dilakukan. Ini juga dapat mengurangi produktivitas dan menyebabkan kerusakan tanaman dasar, organisme dasar, dan stok ikan. Selain mengurangi atau merusak nilai estetika lingkungan pesisir dan lautan, membahayakan kesehatan pada manusia atau bahkan dapat menyebabkan kematian, dan merugikan secara sosial-ekonomi (Dahuri et al., 2008).

Menurut Rukmana (2016), kegiatan penambangan di zona pertambangan terbuka maupun bersyarat akan berdampak pada :

- a. Lingkungan fisik kawasan dampak terhadap kondisi fisik (hidroceanografi, geologi atau geomorfologi),
- b. Lingkungan hayati atau dampak ekologis (kawasan lindung, perikanan)
- c. Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya (wisata bahari, permukiman, alur pelayaran, infrastruktur).

Rukmana (2016) menyatakan bahwa dampak negatif dari kegiatan pertambangan yang cukup berarti terhadap lingkungan, ekosistem laut dan pesisir, diantaranya yaitu :

- a. Penurunan hasil tangkapan ikan nelayan tradisional yang menyebabkan dampak lebih lanjut yaitu penurunan pendapatan nelayan
- b. Terjadinya abrasi pantai yang dapat menyebabkan benteng atau tembok tambak budidaya ikan dan udang menjadi runtuh, bocor atau longsor, dan merusak ekosistem pesisir.
- c. Terjadinya gangguan pada usaha budidaya air laut, karena terjadi kekeruhan badan air pada radius 3 sampai 4 km dari daerah penambangan. Usaha tersebut seperti usaha keramba, jaring apung dan ekosistem di laut lainnya.
- d. Perubahan pola hidrodinamika air laut akibat perubahan permukaan dasar perairan
- e. Konflik sosial yang terjadi pada penduduk setempat akibat adanya tenaga kerja asing

2.1.4. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

Ketika orang berbicara tentang pengertian sosial ekonomi, mereka jarang berbicara satu sama lain. Sebaliknya, mereka sering berbicara tentang keduanya

secara terpisah. Dalam ilmu sosial, istilah atau pengertian sosial selalu mengacu pada subjek yaitu masyarakat. Namun departemen kesejahteraan berfokus pada solusi masalah kesejahteraan masyarakat, dan ruang lingkup pekerjaannya mencakup kesejahteraan sosial (Soekanto, 1982).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kata sosial dapat mengacu pada semua hal yang terkait dengan masyarakat. Namun, karena manusia sebenarnya tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga kata sosial sering digunakan dalam konsep sosiologi untuk mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Keadaan sosial seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan masyarakatnya, ini berlaku baik dalam lingkungan hidup yang kecil (keluarga) maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Namun, ekonomi mencakup bidang yang mempelajari cara membuat, mendistribusikan, dan menggunakan komoditas serta kekayaan, termasuk keuangan, industri, dan perdagangan (Departemen Pendidikan Nasional, 1996).

Keadaan pada lingkungan pemukiman, pekerjaan, serta kemampuan untuk mengakses pendidikan sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat. Kondisi sosial ekonomi secara umum dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan seseorang dibandingkan dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan papan (Aksad, 2008.).

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Indonesia hidup dari pekerjaan nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Untuk mendapatkan hasil tangkapan yang optimal, nelayan harus berpindah-pindah dalam berusaha, karena sifat dinamis sumber daya yang mereka garap. Selain itu, masyarakat nelayan hidup dalam lingkungan yang keras dan penuh dengan ketidakpastian karena resiko usaha yang tinggi (Sabenan, 2007).

Departemen Kelautan dan Perikanan (2002) menyatakan bahwa nelayan adalah individu yang menghasilkan pendapatan dari penangkapan ikan di laut. Menurut Kusnadi (2002), nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang hidupnya bergantung pada hasil laut, baik melalui cara penangkapan atau budidaya. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir, yang merupakan tempat perlintasan antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2002).

Kehidupan sosial ekonomi rumah tangga nelayan telah diteliti sejak tahun 1980, misalnya penelitian yang dilakukan di desa pesisir Sulawesi Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan yang hanya bergantung pada usaha menangkap ikan memperoleh pendapatan yang hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan jika ada uang yang tersisa, itu biasanya digunakan untuk membeli pakaian, biaya pendidikan anak, dan untuk memperbaiki rumah tempat tinggal. Studi yang dilakukan pada komunitas nelayan di luar negeri menunjukkan bahwa organisasi sosial ekonomi dan lembaga terkait lainnya di desa pesisir memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Dengan kata lain, organisasi sosial ekonomi dapat membantu bisa menjadi penunjang dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Jika tidak ada organisasi sosial ekonomi, nelayan akan bekerja dan hidup sendirian tanpa ada yang membantu atau melindungi mereka (Mantjoro, 1998).

Dalam studinya tentang diversifikasi (penganekaragaman) pekerjaan keluarga nelayan untuk mempertahankan hidup, Haryono (2015) menemukan bahwa: (1) Nelayan sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga mereka tidak dapat melaut sepanjang tahun, yang berdampak pada stabilitas ekonomi mereka. (2) Nelayan akan mencari pekerjaan lain sesuai dengan keterampilan mereka untuk tetap bertahan hidup. (3) Pekerjaan pengganti dipilih berdasarkan keterampilan yang nelayan miliki, seperti bekerja sebagai tukang becak, ojek motor, berjualan kecil-kecilan di pasar, dan sebagainya. (4) Kondisi keterbatasan rumah tangga nelayan menyebabkan anak-anak dari keluarga nelayan kadang-kadang terlibat dalam aktivitas ekonomi. (5) Bagi keluarga nelayan, diversifikasi pekerjaan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, terkait dengan variabilitas dan ketidakpastian dalam penghasilan mereka dari hasil melaut (Haryono, 2005).

Nelayan biasanya memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, tingkat kehidupan mereka sedikit di atas pekerja migran atau sebanding dengan petani kecil (Kusnadi, 1987). Dalam bukunya, Mubyarto menyatakan bahwa jika nelayan dibandingkan dengan masyarakat lain disektor pertanian, terutama nelayan kecil dan tradisional dapat dianggap sebagai lapisan sosial yang paling miskin (Mubyarto et al., 1984). Abdulsyani (2007) menyatakan bahwa sosial ekonomi merupakan kedudukan atau posisi individu yang ditentukan pada jenis kegiatan ekonominya, pendapatannya, tingkat pendidikannya, jenis rumahnya, dan

posisinya dalam kelompok. Menurut Yusuf (2017), posisi suatu masyarakat di dalam kelompoknya tersebut sebagai kondisi sosial ekonominya. Posisi ini dikaitkan dengan pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan kekayaan yang dimilikinya

Dalam penelitian mereka di Jepara, Mubyarto dan kawan-kawan (1984), menentukan stratifikasi masyarakat nelayan berdasarkan kondisi ekonomi (Mubyarto et al., 1984). Berdasarkan keadaan ekonomi mereka, nelayan dibagi menjadi :

- a. Nelayan kaya yang memiliki kapal (juragan) dan mempekerjakan nelayan lain sebagai penjaga tanpa ia sendiri harus ikut bekerja,
- b. Nelayan kaya yang memiliki kapal, tetapi tetap bekerja sebagai awak,
- c. Nelayan sedang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan pokoknya dari menjadi nelayan dan memiliki perahu sendiri tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga,
- d. Nelayan yang miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus mencari pekerjaan tambahan untuk dirinya sendiri, istri dan anak-anaknya,
- e. Nelayan pendega atau tukang kiteng.

Mayoritas masyarakat nelayan menghadapi keterbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan akses ke sumber daya. Taraf penghasilan nelayan yang pada kebanyakan, masih terbilang rendah menunjukkan keterbatasan ekonomi mereka. Memang ada nelayan yang sangat sukses dari segi ekonomi, tetapi disamping jumlahnya tidak terlalu banyak, juga keberhasilan itu lebih nampak pada mereka yang mempunyai pekerjaan rangkap sebagai pedagang (Wahyono et al., 2001).

Menurut Mubyanto (1984) bahwa ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh nelayan apabila dibandingkan pada petani, yaitu :

- a. Pendapatan nelayan adalah harian (daily inharents) dan sulit untuk dihitung jumlahnya. Musim dan status nelayan dapat mempengaruhi pendapatannya.
- b. Tingkat pendidikan nelayan dan anak-anaknya umumnya rendah dilihat dari pendidikannya.
- c. Karena produk nelayan bukan merupakan pokok dan mudah rusak serta habis jika dipaksakan, sehingga nelayan lebih banyak berhubungan

dengan ekonomi tukar menukar. Hal tersebut membuat nelayan sangat bergantung pada pedagang

- d. Bila dibandingkan dengan sektor pertanian dan sektor lainnya, industri perikanan cenderung mengandung resiko yang lebih tinggi dan membutuhkan investasi yang cukup besar. Akibatnya, mereka biasanya hanya menggunakan alat-alat sederhana atau hanya menjadi anak buah kapal (ABK). Terlihat ada pembagian hasil yang tidak menguntungkan antara nelayan dan pemilik kapal.
- e. Kehidupan nelayan mungkin juga didukung oleh kerentanan. Misalnya bila dibandingkan dengan petani, nelayan sangat bergantung pada menangkap ikan sebagai mata pencaharian, dan anggota keluarga mereka tidak dapat secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi.

Menurut L. Marbun & N. Krishnayanti (2002), membagi nelayan berdasar pada sumber pendapatannya meliputi :

- a. Nelayan tetap atau nelayan penuh merupakan nelayan yang seluruh pendapatannya berasal dari perikanan.
- b. Nelayan sambilan utama merupakan nelayan yang pendapatannya sebagian besar berasal dari perikanan.
- c. Nelayan sambilan tambahan yakni nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan.
- d. Nelayan musiman yakni orang yang dalam musim-musim tertentu saja aktif sebagai nelayan.

Menurut status dan peran seseorang dalam masyarakat, status sosial ekonomi seseorang dapat dikategorikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat status sosial ekonomi dilihat atau diukur melalui pendidikan, pendapatan, rumah, kesehatan, sandang pangan dan interaksi sosial. (Koentjaraningrat, 2008).

Kondisi sosial ekonomi yang di maksud dalam penelitian ini adalah gambaran umum mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Bahodopi, meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan, perumahan, kepemilikan fasilitas hidup (aset) dan lapangan pekerjaan. Secara umum status sosial ekonomi ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Sedangkan pendidikan menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kepribadian melalui pengembangan kekuatan rohani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) dan jasmani (indera dan keterampilan).

Pada dasarnya, pendidikan dibagi menjadi pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Perbedaan dari ketiga pendidikan tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraannya. Pendidikan formal berasal dari sekolah, pendidikan nonformal berasal dari lingkungan masyarakat dan bimbingan belajar yang aturannya sedikit dilonggarkan, serta pendidikan informal berasal dari lingkungan keluarga yang berlangsung secara natural dan wajar (Ulan Ria, 2017). Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan tinggi yang merupakan pendidikan terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan memainkan peran penting pada kehidupan masyarakat seperti pada dunia pekerjaan, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar daya saingnya, yang pada gilirannya akan berdampak baik pula pada penambahan pendapatan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk dapat memerangi kemiskinan dan pengangguran (Ulan Ria, 2017).

b. Pendapatan

Status sosial seseorang dipengaruhi oleh pendapatannya, terutama pada masyarakat materialis dan konvensional yang mengutamakan status sosial ekonomi yang tinggi sebagai hasil dari kekayaan. Pendapatan didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai hasil kerja (usaha atau lainnya). Pendapatan menurut kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh individu, perusahaan, atau organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba (B. Marbun, 2003).

Pedapatan adalah semua uang atau barang yang diterima seseorang atau kelompok dalam jangka waktu tertentu, yang dinilai dengan uang pada harga yang berlaku. Pendapatan juga dapat berfungsi sebagai indikator sosial ekonomi. Baik tinggi maupun rendahnya penghasil akan mempengaruhi bagaimana masyarakat mengatur perilaku ekonomi mereka sendiri. Tingkat pendapatan juga dapat menyebabkan dinamika dalam kehidupan sosial di masyarakat setempat. Semakin besar pendapatan masyarakat, maka semakin baik kehidupan ekonominya serta posisinya di dalam masyarakat (Ulan Ria, 2017).

c. Perumahan

Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga. Rumah juga berfungsi sebagai tempat perlindungan keluarga dan tempat menyimpan barang berharga. Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan lingkungan sekitarnya yang digunakan sebagai tempat tinggal dan rekomendasi untuk tinggal bersama (Intan, 2019).

Rumah menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1992, didefenisikan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana membina keluarga. Dalam defenisi yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (struktural), tetapi juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat (Heinz et al., 2006).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rumah ialah bangunan atau struktur fisik yang digunakan sebagai tempat bernaung, di mana lingkungannya baik untuk kesehatan fisik, mental, dan sosialnya, baik untuk kesehatan individu maupun keluarga (Intan, 2019).

d. Kesehatan

Kesehatan setiap anggota keluarga sangatlah penting untuk bisa bekerja secara baik dan menciptakan uang buat mencukupi kebutuhan hidup. Kesehatan keluarga sangat berkaitan langsung dengan ketersediaan makanan pada keluarga. Mereka saling berpengaruh satu sama lain karena keduanya berhubungan satu sama lain. Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan keluarga yaitu pelayanan kesehatan dan perubahan alam (Intan, 2019). Kesehatan masyarakat merupakan

indikator penting dari kondisi sosial ekonomi, karena masyarakat yang sehat dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan baik.

e. Kepemilikan Aset atau Fasilitas

Menurut Abdul Syani, memiliki berbagai jenis kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti perhiasaan, televisi, kulkas, dan lainnya, dapat menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat.

Barang elektronik, alat komunikasi dan sarana transportasi adalah aset dan fasilitas yang dimiliki menjadi subjek penelitian ini. Kepemilikan aset dan fasilitas hidup adalah salah satu faktor penentu kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat karena barang-barang tersebut, sering digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Barang elektronik seperti TV, kulkas, AC dan Laptop, sementara alat komunikasi yaitu *smartphone*. Untuk alat transportasi seperti sepeda motor, mobil dan kapal atau perahu motor.

f. Lapangan Pekerjaan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari bisnis atau perusahaan atau kantor tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan bisnis, perusahaan, atau kantor di mana tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan kerja ini terbagi menjadi sepuluh kategori, masing-masing terdiri dari lima sub kategori pertanian dan lima kategori lainnya (BPS, 2021).

- Sektor Pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan lainnya
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Perdagangan
- Sektor Jasa
- Sektor Angkutan
- Sektor Lainnya

Lapangan kerja tentunya pasti akan membutuhkan karyawan dari masing-masing sektornya. Mereka yang sedikit kreatif pasti memiliki orientasi mencari kerja yang lebih baik. Mereka juga dapat melihat dan peluang dari berbagai bidang lapangan kerja untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Penambahan lapangan kerja dan peningkatan

produktivitas di sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menghasilkan peningkatan pendapatan bagi penduduk di wilayah tersebut.

2.1.5. Aktivitas Masyarakat Nelayan

Masyarakat yang hidup di kawasan pesisir pada umumnya menekuni pekerjaan sebagai nelayan, namun ada pula yang bekerja sebagai petani. Salah satu pekerjaan utama dari nelayan adalah menangkap ikan dan komoditas laut lainnya, yang kemudian di suplai atau di jual ke pasar domestik. Nelayan dalam aktivitas menangkap ikan menggunakan kapal atau perahu motor untuk memasuki perairan dan menggunakan berbagai alat tangkap seperti peralatan tangkap tradisional yaitu jaring dan pancing, maupun dengan peralatan tangkap semi modern dan modern seperti bagan, rumpon, kapal motor, pukot dan lainnya. Nelayan juga memiliki ketrampilan mampu membaca tanda alam, memahami musim ikan, dan menemukan habitat ikan yang banyak.

Nelayan di kenal dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, sehingga dalam mengatasi kondisi tersebut, setiap nelayan selalu berusaha melakukan usaha-usaha yang hasilnya diharapkan dapat meringankan beban hidup yang di alami. Nelayan selain menangkap ikan juga melakukan aktivitas bercocok tanam, terutama di daerah pesisir yang memiliki potensi pertanian. Namun bagi nelayan yang tidak memiliki lahan pertanian biasanya memilih cara lain untuk mendapatkan pendapatan tambahan selain melaut.

Pola sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat nelayan berbeda dari masyarakat lain karena interaksi mereka dengan lingkungan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pola ini membentuk cara masyarakat nelayan berpikir dan bertindak dalam aktifitas sosial ekonomi sehari-hari.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun penelitian saat ini dan merupakan upaya peneliti untuk membandingkan dengan penelitian saat ini. Penelitian yang berkaitan dengan dampak kawasan industri terhadap sosial ekonomi masyarakat sudah cukup banyak, namun buat masyarakat nelayan belum terlalu banyak. Penelitian-penelitian terdahulu akan menjadi acuan dan sebagai bahan rujukan dalam memperkaya bahan kajian dalam melakukan penelitian ini.

Akhmad Asep Erista melakukan penelitian pada tahun 2014 di Desa Tobat tentang dampak pembangunan kawasan industri terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dampak adanya industri terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Tobat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri memiliki dampak yang besar dan positif pada nilai kekeluargaan yang tetap kuat, hubungan masyarakat terjalin dengan baik, kesadaran masyarakat akan kualitas mutu pendidikan yang tinggi, tunjangan kesehatan merata, pengasilan tambahan dan memiliki etos kerja yang baik yaitu disiplin dan rajin. Kustina Ayu (2016), melakukan penelitian mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tambang nikel di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, menemukan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di sekitar tambang menunjukkan kondisi yang cukup baik, dan masyarakat merasa lebih baik setelah area tambang dibuka. Namun, penyebaran penyakit ISPA di daerah sekitar tambang menunjukkan dampak negatif kondisi kesehatan masyarakat sekitar.

Penelitian tentang pengaruh aktivitas pertambangan terhadap lingkungan pemukiman masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Bahodopi dilakukan oleh Siti Rukmana pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pendapatan masyarakat, penurunan kualitas udara, kondisi jaringan jalan, dan kondisi air bersih. Penelitian lain tentang pengaruh aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dilakukan oleh Delvien Jacob dan E. Sandjaya pada tahun 2018 di Daerah Tolikara, Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak pabrik yang terletak pada suatu kawasan wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah, yang akan berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penelitian lain terkait dampak perkembangan kawasan industri nikel di Kecamatan Bahodopi terhadap sosial ekonomi dilakukan oleh Yeni Nuraeni pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, hal tersebut terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang baik, meningkatnya nilai IPM, menurunnya jumlah penduduk miskin dan adanya peningkatan PDRB khususnya pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Namun terdapat dampak negatif yaitu budaya hidup konsumtif, kurangnya inovasi dalam mengembangkan usaha, kecenderungan masyarakat ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan dan mudah. Penelitian lain

tentang dampak kawasan industri di Bahodopi terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar juga dilakukan oleh Afdhaliah K. Usman pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan merasa dampak yang dirasakan dengan adanya kawasan yaitu kebisingan dan kualitas udara yang sangat memburuk.

Penelitian tentang dampak pengembangan kawasan industri terhadap pendapatan masyarakat juga dilakukan oleh Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Universitas Tadulako pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Bahodopi 76 persen berada di atas Rp 3 juta rupiah. Bahkan dari data tersebut, terdapat 43 persen menyatakan berpendapatan di atas Rp 5 juta rupiah. Penelitian tentang pengaruh industri pertambangan nikel terhadap kondisi lingkungan maritim di kabupaten Morowali dilakukan oleh Nurhayati Syarifuddin tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya sidementasi pesisir Morowali akibat dari pembuangan limbah. Laut di sekitar pesisir pantai mengalami pencemaran, banyak endapan lumpur sisa tambang dengan kandungan logam dan kimia berbahaya. Hal tersebut mengakibatkan nelayan-nelayan kecil dan tradisional mengalami penurunan pendapatan karena hasil tangkapan berkurang.

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hal terbaru dari penelitian ini adalah melihat secara langsung dampak dari pengembangan kawasan industri yang terfokus pada penduduk nelayan. Di mana diketahui bahwa masyarakat nelayan memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, sehingga sebagian besar masyarakat nelayan diidentikan dengan kemiskinan. Banyak penelitian-penelitian tentang dampak pembangunan kawasan industri atau pembangunan industri terhadap sosial ekonomi, namun objek yang diteliti belum terfokus pada sosial ekonomi masyarakat nelayan. Pada penelitian ini sosial ekonomi yang akan diteliti yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan (rumah tempat tinggal), pendapatan, kepemilikan aset, dan lapangan pekerjaan, serta bagaimana aktivitas masyarakat nelayan dengan adanya kawasan industri.

2.3. Kerangka Konseptual

Keberadaan kawasan industri pada suatu daerah akan bernilai lebih pada wilayah tersebut serta masyarakat sekitar. Industri-industri yang ada di kawasan tersebut hendaknya akan membuka peluang kerja padai masyarakat sekitar.

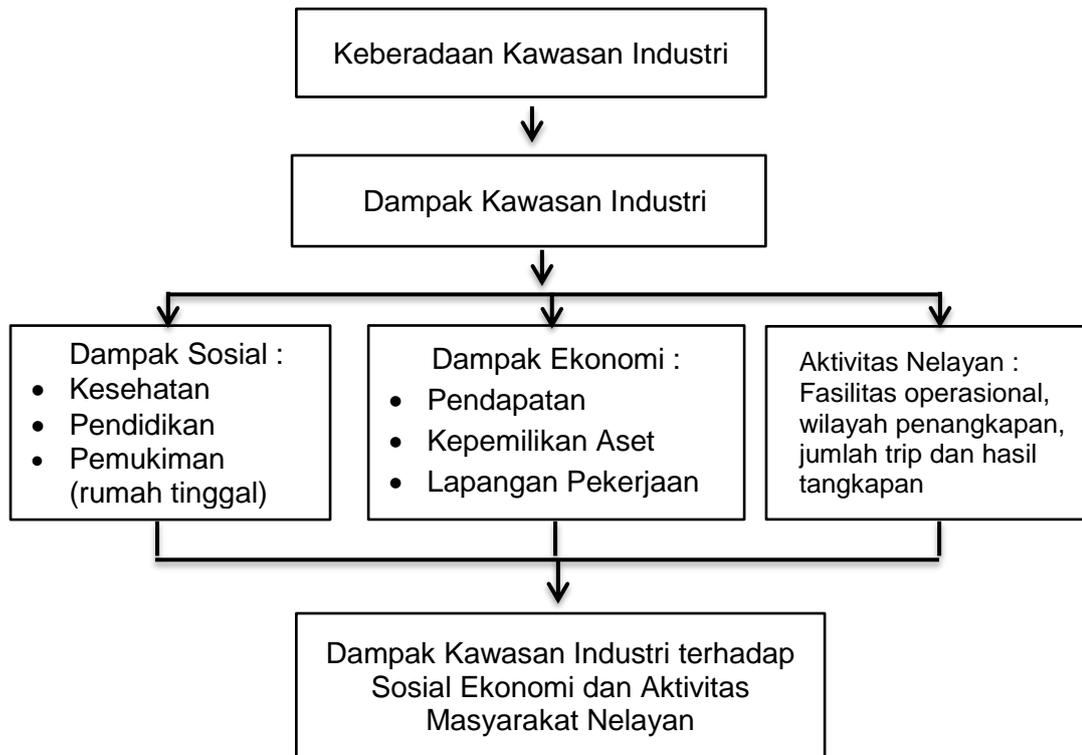
Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar lokasi kawasan industri. Adanya kawasan industri pula dapat membawa perubahan dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, kebergantungan pada mata pencaharian pada sektor industri. Perubahan tersebut terjadi karena masyarakat merasa pekerjaan dahulu tidak menjanjikan lagi. Banyaknya masyarakat dari luar daerah yang akan datang untuk bekerja di kawasan industri dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar seperti usaha kos-kosan, kios, laundry, rumah makan dan usaha lainnya. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Menurut Aksad (2008) kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat sangat mempengaruhi lingkungan pemukiman, pekerjaan dan kemampuan dalam mengakses pendidikan. Kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan keperluan untuk mengakses pendidikan dan memenuhi kebutuhan hidup standar seperti makanan, pakaian, dan papan.

Namun keberadaan kawasan industri pula dapat berdampak pada perubahan lingkungan. Terjadi reklamasi pantai, pencemaran pada laut dan terjadi peningkatan polusi udara yang diakibatkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor para pekerja pabrik maupun kendaraan pengangkut, serta debu dan asap dari pabrik pengolahan tambang menyebabkan banyaknya penduduk sekitar wilayah industri yang terkena penyakit tenggorokan dan pernapasan. Hal tersebut sesuai dengan data dari Puskesmas Bahodopi bahwa kasus penyakit ISPA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dampak tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar kawasan industri.

Reklamasi pantai dan pencemaran laut pada pesisir pantai akibat aktivitas industri sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Bahodopi. Pencemaran tersebut membuat hasil tangkapan nelayan berkurang, sehingga berpengaruh pada pendapatan. Nelayan harus menempuh jarak yang jauh untuk menangkap ikan, membuat biaya operasional meningkat. Sehingga banyak nelayan yang mengurangi aktivitas sebagai nelayan dan beralih profesi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Kusnadi (2007) bahwa ciri umum dari masyarakat nelayan adalah memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, sedikit di atas pekerja migran atau setaraf dengan petani kecil.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya, dimana masyarakat Nelayan menjadi objek utama dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi subjek utama penelitian ini yaitu faktor sosial yaitu kesehatan, pendidikan dan pemukiman (rumah tinggal), serta faktor ekonomi yang meliputi pendapatan, kepemilikan aset dan lapangan pekerjaan serta bagaimana aktivitas nelayan setelah adanya kawasan industri.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4. Defenisi Konsep

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosial ekonomi Masyarakat nelayan yang terdiri dari lapangan pekerjaan, sikap penerimaan, kesehatan masyarakat, pendidikan, pemukiman (rumah tinggal), pendapatan dan kepemilikan aset, serta aktivitas sebagai nelayan. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Masyarakat nelayan yakni masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang tinggal di Kecamatan Bahodopi.

- b. Kawasan Industri adalah Kawasan industri berbasis nikel yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) yang berada di Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dalam hal ini aktivitas yang di maksud adalah aktivitas dari kawasan industri.
- d. Dampak sosial yang dimaksud meliputi kesehatan, pendidikan dan pemukiman (rumah tinggal).
- e. Dampak ekonomi yang dimaksud meliputi lapangan pekerjaan, pendapatan dan kepemilikan aset.
- f. Kesehatan masyarakat adalah pandangan masyarakat nelayan mengenai kondisi kesehatan sebelum dan setelah adanya kawasan industri, kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, frekuensi kunjungan ke Rumah Sakit/Puskesmas, jenis penyakit yang sering diderita, serta jaminan kesehatan.
- g. Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terakhir yang telah ditamatkan oleh nelayan berdasarkan ijazah yang dimiliki. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- h. Pemukiman (rumah tinggal) adalah bangunan rumah yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) kondisi yaitu layak huni dan tidak layak huni. Di mana rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) syarat wajib yang harus dipenuhi agar rumah dapat dikategorikan layak huni, diantaranya :
- Memiliki ketahanan bangunan, di mana atap, dinding dan lantai rumah harus memenuhi syarat.
 - Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perorang lebih besar atau sama dengan 7,2 m².
 - Memiliki akses pada air minum yang memenuhi syarat
 - Memiliki akses sanitasi yang layak dan memenuhi syarat bangunan atas dan bawah.

- i. Lapangan pekerjaan adalah pandangan masyarakat tentang kondisi pekerjaan, sarana lapangan pekerjaan, kemampuan bekerja pada bidang lain, kemauan untuk terlibat bekerja pada kawasan industri.
- j. Pendapatan adalah tingkat pendapatan total yang diperoleh selama sebulan baik dari mata pencaharian utama maupun sampingannya, sebelum dan sesudah adanya kawasan industri yang diklasifikasi kurang dari Rp. 1.500.000, antara Rp 1.500.001 sampai Rp. 2.500.000, antara Rp. 2.500.001 sampa Rp. 3.500.000, dan lebih dari Rp. 3.500.000. Kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta persepsi nelayan terhadap pendapatan setelah adanya kawasan industri
- k. Kepemilikan Aset adalah kepemilikan kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti alat elektronik, perhiasaan, televisi, kulkas, alat transportasi dan lain-lain.
- l. Aktivitas nelayan yang dimaksud adalah kegiatan nelayan dalam menangkap ikan di laut, yang meliputi fasilitas operasional dalam melaut, lokasi penangkapan ikan, jumlah trip dalam seminggu serta hasil tangkapan per trip dalam kg.